KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8694-0776-8946-8041

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099090/2025

Revisi ke 05
Tanggal : 09 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(03)	Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(099090)	PENGADILAN TINGGI SEMARANG
Sebesar	:	Rp. 694.605.000	(ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	694.605.000
005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	694.605.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	694.605.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
			5. Hibah Langsung	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG II (134) Rp. 694.605.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8694-0776-8946-8041

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Program	: 005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	694.605.000
Kegiatan	: 1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	694.605.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
	2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	3. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
	4. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
	5. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	6. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
	7. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
	8. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	9. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	10. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	11. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
	12. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkunganperadilan umum	
	13. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
	14. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
	15. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
	16. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
	17. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	
	18. 14	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	
	19. 15	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8694-0776-8946-8041

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi	37,00	kegiatan	273.000.000
Rincian Output		:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	36.00	kegiatan	248.000.000
			02 AEA.003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.00	kegiatan	25.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	78,00	orang	187.740.000
Rincian Output		:	01 AEF.001	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	78.00	orang	187.740.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	659,00	Perkara, Berkas Perkara	233.865.000
Rincian Output		:	01 BCA.U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	623.00	Perkara	209.700.000
			02 BCA.U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	36.00	Perkara	24.165.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025

DS:8694-0776-8946-8041

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

							Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	694.605.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	694.605.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:8694-0776-8946-8041

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099090	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**	**-**	**694.605**	**-**	**-**	**-**	**694.605**		
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**694.605**	**-**	**-**	**-**	**694.605**		
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**	**-**	**694.605**	**-**	**-**	**-**	**694.605**		
1049.AEA	Koordinasi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	273.000	-	-	-	273.000	03 . 51	
01	RM	-	273.000	-	-	-	273.000	134@	
1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	187.740	-	-	-	187.740	03 . 51	
01	RM	-	187.740	-	-	-	187.740	134@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	233.865	-	-	-	233.865	03 . 51	
01	RM	-	233.865	-	-	-	233.865	134	
	JUMLAH	**-**	**694.605**	**-**	**-**	**-**	**694.605**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:8694-0776-8946-8041

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**099090**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	34.234	30.363	6.894	31.048	13.517	45.844	54.261	15.743	36.304	311.126	108.011	7.261	694.605
		BELANJA BARANG	34.234	30.363	6.894	31.048	13.517	45.844	54.261	15.743	36.304	311.126	108.011	7.261	694.605
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	34.234	30.363	6.894	31.048	13.517	45.844	54.261	15.743	36.304	311.126	108.011	7.261	694.605
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	34.234	30.363	6.894	31.048	13.517	45.844	54.261	15.743	36.304	311.126	108.011	7.261	694.605
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.085	12.910
		- PNBP (425239)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.085	12.910

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
IV A. B L O K I R

DS:8694-0776-8946-8041

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [099090] PENGADILAN TINGGI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
099090	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	212.470		
	52 Belanja Barang	Rp.	212.470		
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**				
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**				
1049.AEA	**Koordinasi**				
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	124.000		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
1049.AEF	**Sosialisasi dan Diseminasi**				
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.645		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	84.825		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
IV B. C A T A T A N

DS:8694-0776-8946-8041

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [099090] PENGADILAN TINGGI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002